

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara global. Peran sektor keuangan ini dapat dilihat dari keuangan trilogy pemberdayaan konsumen. Para pemimpin Negara-negara yang tergabung dalam G20 dalam forum *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 2010 juga telah menetapkan bahwa integrasi dari prinsip literasi keuangan, inklusi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Berdasarkan survei bank dunia oleh Gerrans & Hershey (2013) dalam Indrawati (2014) menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia hanya 20 persen, sementara Negara ASEAN lainya seperti Filipina 27 persen, Malaysia 66 persen, Thailand 73 persen, dan Singapura 98 persen. Kesenjangan sektor keuangan di Indonesia tidak hanya menyangkut keterjangkauan atau inklusi, tetapi juga tentang pemahaman atau literasi.²

¹ OJK RI,2016. *Consultation Paper (RPOJK tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Untuk Konsumen dan/atau Masyarakat*:Direktorat Penelitian dan Pengaturan EPK Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.hlm.1

²Yulia Indrawati.*Determinan Dan Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Perkotaan Dikabupaten Jember*.Jurnal.hlm.1

Literasi keuangan telah menjadi salah satu fokus kebijakan OJK. Hal ini dipicu dari hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SLNK) tahun 2013 yang diselenggarakan oleh OJK di 20 provinsi dengan melibatkan delapan ribu orang responden, pada sektor perbankan hasilnya sebagai berikut:

Table 1.1 Tingkat Financial Literacy di 20 Provinsi

Perbankan

<i>Well Literate</i>	21,80%
<i>Sufficient Literate</i>	75,44%
<i>Less Literate</i>	2,04 %
<i>Not Literate</i>	0,73 %
Utilitas	57,28 %

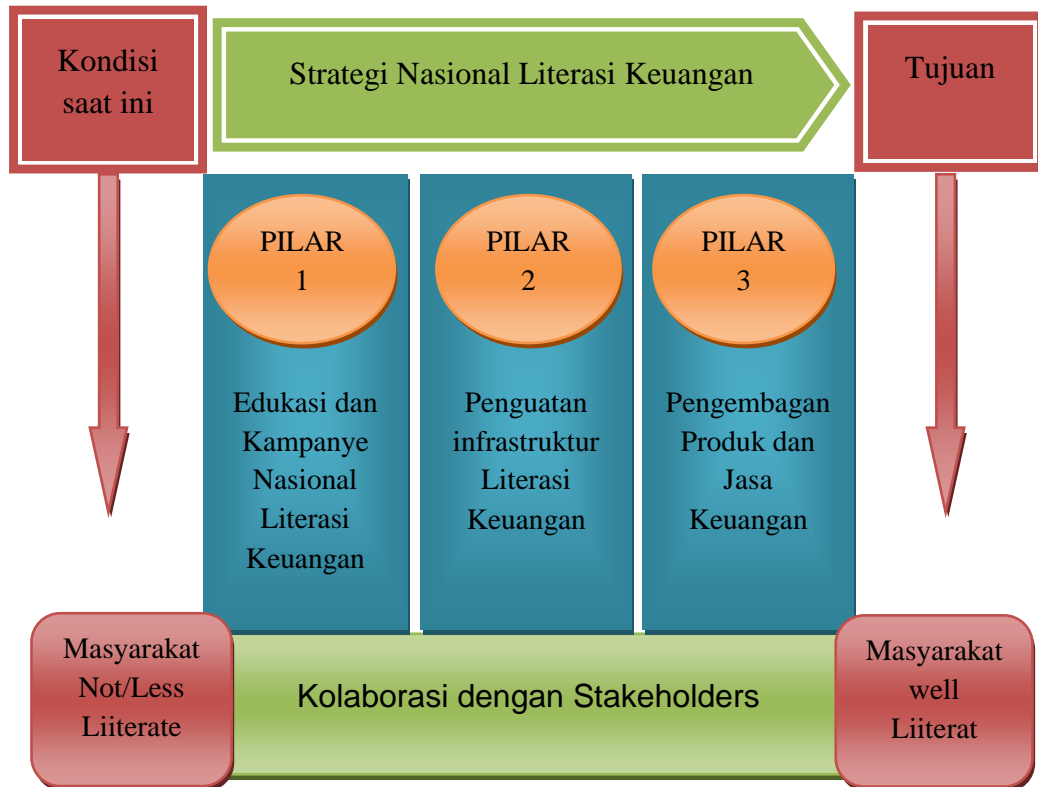
Sumber: OJK (Strategi Nasional Literasi Keuangan)

Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cenderung masih kurang memahami konsep keuangan dan tidak memiliki pengetahuan untuk membuat keputusan keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan dari data diatas literasi keuangan masyarakat Indonesia pada sektor perbankan masih rendah.

Presiden Indonesia pada 19 November 2013, telah meluncurkan Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia agar upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat berlangsung dengan lebih terstruktur dan sistematis. Program edukasi dan literasi keuangan ke kalangan murid sekolah menengah atas juga merupakan upaya OJK untuk melakukan edukasi keuangan sedini mungkin, mengingat hasil survey nasional literasi keuangan OJK

menunjukkan hanya 28 persen pelajar atau mahasiswa yang memiliki tingkat literasi yang baik atau *well literate*, dengan tingkat utilitasnya sebesar 44 persen.³

Upaya yang digunakan dalam meningkatkan literasi keuangan adalah melalui penyusunan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang terdiri dari tiga pilar, yang merupakan *komperhensif* dan *sistematis* untuk mencapai masyarakat yang *well literate* yang dirumuskan dengan memperhatikan kondisi saat ini.⁴



Sumber: OJK (Sreategi Nasional Literasi Keuangan)
Gambar 1.1 Sreategi Nasional Literasi Keuangan

³ www.ojk.id

⁴ OJK. (2016). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Direktorat Literasi dan Edukasi. Booklate.

Menurut OJK salah satu faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan pangsa pasar keuangan syariah nasional adalah meningkatkan pemahaman dan preferensi masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan syariah. Berbagai program strategis telah dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan kementerian terkait, pemerintah daerah dan *stakeholders* terkait lainnya.

Rendahnya tingkat literasi keuangan selaras dengan rendahnya pemanfaatan produk dan jasa perbankan oleh masyarakat yang hanya mencapai 57,28 persen. Edukasi literasi keuangan bagi masyarakat menjadi suatu program strategis OJK dalam meningkatkan penggunaan produk lembaga keuangan, dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai prioritas sasaran edukasi literasi keuangan pada tahun 2014.⁵

Sehubungan dengan rencana peningkatan tingkat *literacy financial* masyarakat Indonesia pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /SEOJK.07/2014 menyebutkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib melaksanakan kegiatan Edukasi Keuangan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

Program edukasi *financial literacy* dapat dikatakan optimal apabila telah melaksanakan dalam programnya sesuai dengan ketentuan SEOJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 dan mampu mengimplementasikan dari tujuan program edukasi tersebut. Sehingga program edukasi yang dilakukan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat yang diedukasi oleh Lembaga Keuangan

⁵ www.republika.co.id

Syariah mendapatkan manfaat dari program tersebut dan dapat meningkatkan syariah *financial literacy* dan Meningkatkan jumlah pengguna produk jasa keuanagan.

Pihak yang menjadi pelaksana edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan atau/ masyarakat di Sektor Jasa Keuangan ini adalah PUJK yang terdaftar dan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan Undang-undangan, baik PUJK yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah yang terdiri dari Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan.⁶

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu PUJK yang wajib melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat, sedangkan pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem perbankan syariah masih belum tepat. Pada dasarnya sistem ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang mempraktikkan riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Akan tetapi, secara praktis produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syariah, masih sangat perlu disosialisasikan secara luas.⁷

⁶ OJK RI,2016. *Consultation Paper (RPOJK tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Untuk Konsumen dan/atau Masyarakat*:Direktorat Penelitian dan Pengaturan EPK Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.hlm. 4

⁷ Syafi'i Antonio, Muhammad.2001.*Bank Syariah (dari Teori ke Praktik)*.Jakarta:Gema Insani.hlm.224

Selanjutnya persepsi masyarakat terhadap Bank syariah masih keliru, diantaranya: (1) bank Islam sebagai bank *social (Baitul Mal)* untuk membantu pembangunan (ekonomi) umat, (2) bank Islam sebagai bank bagi hasil. Implementai kekeliruan tidak membayar tepat pada waktunya dan (3) Bank Islam tidak boleh menyita jaminan.⁸

Kemudian implementasi dari kekeliruan persepsi kedua, memberikan efek atas pandangan masyarakat tentang bank islam sebagai berikut: untuk semua kebutuhan nasabah harus lebih besar jika diandingkan dengan bunga dari bank konvensional, sehingga bagi hasil nasabah pembiayaan harus lebih besar jika dibandingkan dengan itu.

Bank syariah Margirizki Bahagia pusat yang terletak di jalan Parangtritis km 3,5 ruko perwita regency A-16, Bantul mulai beroperasi tanggal 8 Januari 1994 merupakan salah satu Lembaga Jasa Keuangan Syariah tingkat Bank Pembiayaan Syariah yang telah lama berdiri di Yogyakarta yang mana kiprahnya pada dunia perbankan telah lama. Selain itu BPRS Margirizki Bahagia telah melaksanakan kegiatan edukasi syariah *financial literacy* berdasarkan SEOJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat dan/ atau konsumen.

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dan terkait kewajiban bagi PUJK melakukan edukasi pada masyarakat, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang progam

⁸ Muhammad.2002.*Bank Syari'ah (Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman)*. Yogyakarta: ;Ekonesia.hlm. 144

yang dilakukan oleh BPRS Margirizki Bahagia dalam melakukan pelaksanaan SEOJK tentang peningkatan literasi dengan judul “**IMPLEMENTASI PROGRAM EDUKASI SYARIAH *FINANCIAL LITERACY* DI BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA BANTUL YOGYAKARTA (STUDI PADA OPTIMALISASI DAN DAMPAKNYA)**”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana program edukasi syariah *financial literacy* yang dilakukan oleh BPRS Margirizki Bahagia?
2. Bagaimana aplikasi dari program edukasi *financial literacy* yang dilakukan oleh BPRS Margirizki Bahagia terhadap SEOJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat dan/ atau konsumen?
3. Bagaimanakah tingkat *financial literacy* masyarakat yang telah mendapatkan edukasi *financial literacy* dari BPRS Margirizki Bahagia ?

C. TUJUAN MASALAH DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui program edukasi syariah *financial literacy* yang dilakukan oleh BPRS Margirizki Bahagia.
2. Untuk mengetahui aplikasi Program edukasi yang dilakukan oleh BPRS Margirizki Bahagia terhadap SEOJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat dan/ atau konsumen.

3. Untuk mengetahui *financial literacy* masyarakat yang mendapatkan edukasi *financial literacy* dari BPRS Margirizki Bahagia

D. BATASAN PENELITIAN

Agar penelitian ini lebih terfokuskan maka dibutuhkannya batasan masalah, Peneliti dalam melakukan penelitian mempunyai beberapa batasan yaitu:

1. Peneliti dalam meneliti program edukasi syariah *financial literacy* hanya fokus pada lembaga perbankan syariah yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Mengukur tingkat literasi masyarakat dusun Ngarang, Sidoarum, Godean, Sleman yang telah mendapatkan edukasi dari BPRS Margirizki Bahagia Pusat.
3. Penelitian ini lebih terfokuskan pada optimalisasi edukasi *financial literacy* dalam upaya meningkatkan *financial literacy* masyarakat dengan mengimplementasikan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Sehingga output yang diharapkan bagaimana BPRS Margirizki Bahagia dalam mengoptimalkan program edukasi *financial literacy* dalam meningkatkan *financial literacy* masyarakat dan serta aplikasi atau penerapan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/SEOJK.07/2014 tentang pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat dan/ atau konsumen.

E. MANFAAT PENELITIAN

Sebagaimana yang diuraikan penulis di atas mengenai tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi tugas skripsi dan memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan *Financial Literacy* baik secara teoritis maupun praktis.

2. Perbankan

Sebagai bahan referensi untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan pemahaman dan memperluas informasi-informasi syariah *Financial Literacy* dan penggunaan produk-produk perbankan syariah kepada masyarakat.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang syariah *Literacy Financial*, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu dimaksudkan agar dapat menggali informasi lebih mengenai penelitian ini. Peneliti juga dapat membedakan hasil penelitian yang terdahulu dan yang sedang diteliti. Penelitian-Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Nur Azizah Ariani dan Susanti (2015) melakukan penelitian pada mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Negeri Surabaya dengan judul “*Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Financial Literacy Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2012*” penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh indeks prestasi kumulatif, jenis kelamin, tempat tinggal, pengalaman bekerja dan penggunaan ATM terhadap *financial literacy* mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2012 baik secara parsial maupun simultan.

Yulia Indrawati (2015), melakukan penelitian berobyek masyarakat perkotaan dengan judul “*Determinan Dan Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Perkotaan Dikabupaten Jember*”. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menyusun *baseline* studi terhadap tingkat dan determinan literasi keuangan masyarakat perkotaan dikabupaten Jember; (2) merumuskan strategi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat perkotaan di kabupaten Jember. Metode yang digunakan adalah kuantitatif berupa *existing data* dan tabulasi data persepsi melalui wawancara mendalam.

Purnomo M Antara, Rosidah Musa dan Faridah Hassan (2016) melakukan obyek penelitian yaitu produsen bisnis halal dengan judul “*Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjebatanai literasi halal dan islam *financial literacy* pada sikap produsen bisnis halal terhadap islam adopsi pembiayaan. Literasi halal dan islam *financial literacy* akan diukur menggunakan benar / pertanyaan tes palsu dengan pilihan untuk memilih tidak

tahu kemudian, *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) akan digunakan untuk menganalisis scoring menggunakan metode lapangan *weighted lest* untuk menguji validitas konstruk. Penelitian ini berusaha untuk berkontribusi terhadap pengetahuan teoritis baru terutama dalam mengusulkan item pengukuran untuk memahami tingkat melek dikalangan konsumen, terutama dari perspektif prosedur bisnis halal.

Ayu Krishna, Maya Sari dan Rofi Rofaida (2010), melakukan penelitian dengan obyek penelitian mahasiswa UPI dengan judul “ *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Di Kalangan Mahasiswa Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Survey Pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia)*”. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, mendapatkan gambaran tingkat literasi dikalangan mahasiswa UPI ; kedua, mendapatkan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan di kalangan mahasiswa UPI; dan ketiga; mengetahui bagaimana literasi keuangan mempengaruhi opini dan keputusan keuangan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan verikatif.

Heni Wuryani (2016) telah melakukan peneitian dengan judul “Analisis Peta Potensi Pengembangan Perbankan Syariah Di Kabupaten Purworejo”. Tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang *financial literacy* masyarakat. *Kedua*, untuk menganalisis pertumbuhan funding dan financing di BMT. *Ketiga*, untuk menganalisis potensi pengembangan bank syariah di Purworjo berdasarkan tingkat *financial literacy* dan pertumbuhan *financing* dan *funding*.

Tinjauan pustaka diatas menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian ini, penelitian sebelumnya terfokuskan pada tingkat literasi keuangan masyarakat dengan objek yang berbeda dengan hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya literasi keuangan masyarakat. Sedangkan penelitian ini menganalisis edukasi syariah financial literacy terkait SEOJK tentang peningkatan literasi dan meneliti tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah edukasi. Penelitian sebelumnya memberikan informasi bahwa masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat sehingga penelitian-penelitian tersebut menjadi referensi penelitian ini.

Tabel 1.2 Tabulasi / Tabel sebagai Variasi Penjelas Tinjauan Pustaka

NO	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Nur Azizah Ariani dan Susanti (2015)“Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Fianancial Literacy Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2012”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>financial literacy</i> mahasiswa dipengaruhi oleh faktor demografi berupa IPK dan penggunaan ATM, sedangkan faktor demografi berupa jenis kelamin, tempatinggal dan pengalaman bekerja tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap <i>financial literacy</i> mahasiswa. Aspek <i>financial lieracy</i> yang masih rendah adalah pengetahuan umum keuangan pribadi. Hasil Negelkerke R Square menunjukkan angka 29,4%. Hal ini diindikasi terdapat variabel di luar faktor demografi tersebut yang mempengaruhi financial literacy.	1. Objek penelitian adalah mahasiswa. 2. Penelitian ini menggunakan faktor demografi. 3. Penelitian ini mengukur tingkat literasi mahasiswa bukan berdasarkan edukasi <i>financial literacy</i>
2	Yulia Indrawati(2015) “ Determinan Dan Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Perkotaan Dikabupaten	Secara agregat tingkat literasi keuangan masyarakat perkotaan di Kabupaten Jember rendah baik untuk klasifikasi basic financial literacy dan advanced financial literacy. Kondisi ini berbanding terbalik dengan dinamika keuangan dengan jumlah lembaga keuangan	1. Mengukur tingkat literasi masyarakat perkotaan di kabupaten jember. 2. Penelitian ini kuantitatif berupa existing data dan tabulasi data persepsi melalui wawancara

- Jember”
- baik bank maupun non bank dan segala ragam jasa serta produk keuangannya yang cukup pesat. Secara agregat baik pada tingkat basic financial literacy dan advanced financial literacy dipengaruhi tingkat pendapatan, pendidikan, gender, kepemilikan terhadap produk keuangan dan perilaku masyarakat terhadap jasa keuangan. Kepemilikan produk keuangan dana pensiun masih rendah yang disebabkan masih minimnya pengetahuan mengenai dana pensiun dan berbanding terbalik dengan kepemilikan pada produk asuransi.
3. Ayu Krishna, Maya Sari dan Rofi Rofaida (2010)
“ analisis tingkat literasi keuangan dikalangan mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi (survey pada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia”
1. Hasil pengukuran skor rata-rata literasi finansial mahasiswa UPI sebesar 63% yang menunjukkan tingkat literasi finansial mahasiswa masih jauh dari optimum bahkan mendekati kategori rendah.
2. Hasil pengujian menunjukkan faktor demografi seperti jenis kelamin, usia , asal program studi dan pengalaman kerja mempengaruhi tingkat literasi finansial responden. Responden wanita memiliki tingkat literasi finansial lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Mahasiswa mendalam.
3. Menyusun baseline studi terhadap tingkat dan determinan literasi keuangan masyarakat perkotaan di Kabupaten Jember
1. Penelitian ini berkaitan dengan tingkat literasi keuangan dikalangan mahasiswa.
2. Penelitian ini menganalisis tingkat literasi mahasiswa menggunakan faktor demografi.

yang berasal dari program studi ekonomi memiliki tingkat literasi finansial yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang berasal dari program studi non Ekonomi.

3. Hasil penelitian menunjukkan mahasiswa dengan tingkat literasi finansial yang lebih rendah memiliki sikap atau opini yang tidak tepat dibandingkan mahasiswa dengan tingkat literasi finansial yang lebih tinggi dan mahasiswa dengan tingkat literasi rendah lebih banyak memilih keputusan keuangan yang salah dibandingkan mahasiswa yang memiliki tingkat literasi finansial yang lebih tinggi.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | PurnomoM Antara,Rosidah Musa dan Faridah Hasan (2016)“Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem” | Penelitian ini berusaha untuk memberikan kontribusi terhadap pengetahuan teoritis baru. Pengukuran yang diusulkan untuk Halal Literasi dan Islam Financial Literacy dapat membantu pembuat kebijakan dalam memahami tingkat melek keuangan di kalangan konsumen, terutama dari perspektif produsen bisnis Halal ini. Namun, penelitian ini terbatas pada pelaku usaha halal di industri jasa makanan. | 1. Perbedaan penelitian ini mengukur tingkat literasi para produsen halal yang melakukan pembiayaan syariah.
2. Sampel akan mencakup pemilik usaha perusahaan pelayanan makanan atau orang yang memiliki daya keputusan keuangan diperusahaan Malaysia |
|---|---|---|---|

Penelitian ini menunjukkan integrasi antara keuangan halal dan Islam melalui studi literasi

halal dan melek finansial Islam sebagai faktor yang mempengaruhi sikap pemilik bisnis halal terhadap mengadopsi pembiayaan syariah untuk bisnis.

- 5 Heni Wuryani (2016). “Analisis Peta Potensi Pengembangan Perbankan Syariah Di Kabupaten Purworejo”
- Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis peta potensi pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Purworejo karena sampai saat ini (2016) bank syariah belum ada di Kabupaten Purworejo. Lembaga keuangan syariah yang berkembang di Kabupaten Purworejo sampai saat ini hanya *Baitul maal wattamwil* (BMT).
- Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang peneliti dapatkan menggunakan kuesioner, wawancara dan data yang didapatkan dari BMT. Indikator yang diteliti oleh peneliti yaitu tingkat pengetahuan *financial literacy* masyarakat Kabupaten Purworejo, pertumbuhan *funding* dan *financing* pada BMT di Kabupaten Purworejo. Dari hasil penelitian tersebut peneliti memetakan kembali
1. Mengukur tingkat literacy bukan berdasarkan adanya SEOJK tentang edukasi bagi PUJK
 2. Penelitian Heni Wuryani meneliti financial literacy masyarakat pada beberapa sektor lembaga keuangan, sedangkan penelitian ini hanya fokus pada lembaga BPRS.
 3. Pengukuran tingkat literasi yang digunakan oleh henii merupakan untuk melihat potensi pengembangan perbankan syariah, sedangkan penelitian ini mengukur tingkat literasi untuk mengetahui hasil dari edukasi syariah *financial literacy*.
-

potensi pengembangan perbankan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat *financial literacy* masyarakat 55 persen dalam kategori bagus hal ini dapat menjadi peluang berkembangnya perbankan syariah di Kabupaten Purworejo.

G. KERANGKA TEORI

1. Teori Optimalisasi

Optimal diartikan dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer ialah paling baik, paling tinggi, mencapai titik optimal.⁹

Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.¹⁰

Jadi, Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu.

2. Edukasi Keuangan

Pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.07/2014, yang dimaksud dengan kegiatan Edukasi adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi, dengan tujuan untuk mengingat fakta atau

⁹ Salim. Peter, Yeni.Salim. 1991.*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.hlm.1059

¹⁰ Winardi, 1999, Pengantar Manajemen Penjualan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.hlm. 363

kondisi nyata, dengan cara memberi dorongan terhadap pengarahannya, aktif memberikan informasi-informasi atau ide baru.¹¹

a. Cakupan edukasi

Beberapa cakupan rencana edukasi yang tertera dalam SEOJK Nomor 1/SEOJK.07/2014, tentang pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat diantaranya adalah:¹²

- 1) PUJK wajib menyelenggarakan Edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat.
- 2) Rencana penyelenggaraan dimaksud pada angka 1 wajib disusun dalam program tahunan yang dilaporkan pada Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Rencana Edukasi paling kurang meliputi:
 - a) Penetapan program kerja Edukasi sesuai dengan sasaran, strategi dan kebijakan PUJK;
 - b) Evaluasi pelaksanaan rencana Edukasi periode sebelumnya ;
 - c) Penetapan kebutuhan biaya dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana Edukasi.
- 4) Penetapan program kerja Edukasi dimaksud pada angka 3 huruf a mengacu pada program implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, yang akan disusun bersama oleh bidang edukasi

¹¹ SEOJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 Tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen Dan/Atau Masyarakat.hlm.1

¹² *Ibid.* hlm.2

dan perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan dengan PUJK setiap tahun.

- 5) Evaluasi pelaksanaan rencana Edukasi periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b paling kurang memuat:
 - a) Perbandingan rencana edukasi sebelumnya dengan realisasi pada setiap tahun;
 - b) Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam hal-hal yang belum tercapai (jika ada) termasuk penjelasannya;
 - c) Pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
 - d) Kendala yang dihadapi dan upaya-upaya pemecahan masalah yang dilakukan.
- 6) Asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana Edukasi PUJK sebagaimana dimaksud angka 3 huruf c paling kurang memuat :
 - a) Asumsi makro yang meliputi antara lain pertumbuhan rata-rata bisnis di setiap sektor dan tingkat Literasi Keuangan di masing-masing sektor yang terkait; dan
 - b) Asumsi mikro meliputi faktor yang mempengaruhi kegiatan operasional PUJK yang berasal dari internal termasuk alokasi biaya dan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility/CSR*).

b. Pelaksanaan Eduaksi

Pelaksanaan edukasi berdasarkan yang tertera dalam SEOJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 yaitu:¹³

1) Pelaksanaan edukasi berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Inklusif

Yang dimaksud dengan inklusif adalah literasi keuangan harus mencakup semua golongan masyarakat.

b) Sistematis dan terukur

Yang dimaksud sistematis dan terukur adalah literasi keuangan disampaikan secara terperogram, mudah dipahami, sederhana dan pencapaiannya dapat diukur.

c) Kemudahan akses

Layanan dan informasi keuangan tersebar luas diseluruh wilayah indonesia dan mudah diakses.

d) Kolaborasi

meltibatkan seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama dalam mengimplementasikan literasi keuangan.

2) Pelaksanaan Edukasi yang dilakukan secara sistematis dan terukur adalah kegiatan edukasi yang terencana dan dampaknya dapat diukur dari kegiatan yang dilakukan. Pengukuran dampak kegiatan dapat

¹³ SEOJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 *Tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen Dan/Atau Masyarakat*. Commissioners For Education And Consumer Protection, hlm.3

dilakukan antara lain dengan cara misalkan melakukan survei pemahaman terhadap penyampaian edukasi yang sudah dilakukan.

- 3) Kemudahan akses terhadap materi dan substansi Edukasi yang dilakukan oleh PUJK dalam penggunaan sarana edukasi yang dapat menjangkau masyarakat luas.
- 4) Pelaksanaan edukasi kepada konsumen dan/atau masyarakat disesuaikan dengan kemampuan dari PUJK. penyelenggaraan rencana edukasi dapat dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud angka 1 huruf d.
- 5) Pelaksanaan edukasi tidak mencakup pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan termasuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan manfaat, biaya dan risiko.
- 6) Kegiatan yang berupa pemberian bantuan sosial yang bersifat charity dapat merupakan pelaksanaan Edukasi apabila kegiatan tersebut dilakukan berkesinambungan dan dilaksanakan monitoring secara berkala.

c. Manfaat Edukasi Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan salah satu pilar Strategi Nasional Literasi Keuangan yaitu edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan diantaranya:¹⁴

- 1) Meningkatkan *awareness*, pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan;

¹⁴ www.ojk.id

- 2) Mengubah pola pikir dan perilaku keuangan masyarakat; dan
- 3) Meningkatkan jumlah pengguna produk jasa keuangan.

Melalui pelaksanaan fungsi OJK di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang terarah dan terukur, ke depannya diharapkan dapat menumbuhkembangkan rasa percaya diri masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan keuangan serta menciptakan pasar yang wajar dan teratur. Penggunaan produk-produk keuangan secara wajar dan teratur akan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

3. Literasi Keuangan syariah

Menurut Krishna, Sari dan Rofaida Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata (rendah pendapatan), kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan (*miss management*) seperti kesalahan penggunaan kredit, dan tidak adanya perencanaan keuangan. Keterbatasan *financial* dapat menyebabkan stres, dan rendahnya kepercayaan diri bahkan untuk sebagian keluarga kondisi tersebut dapat berujung kepada perceraian. Memiliki literasi keuangan, hal vital untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan berkualitas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa literasi keuangan bersama-sama dengan kemampuan membaca dan matematik merupakan

¹⁵ www.ojk.id

kunci untuk menjadi konsumen yang cerdas, mengelola kredit dan mendanai pendidikan tinggi, *saving* dan *investing* dan warga Negara yang bertanggungjawab.¹⁶

Sedangkan menurut Yulia Indrawati (2015), secara konseptual literasi keuangan memiliki dua dimensi yaitu memahami pengetahuan keuangan secara teori dan menggunakan pengetahuan keuangan yang dimiliki secara aplikasi. Tingkat literasi keuangan dihitung menggunakan bobot sederhana baik untuk klasifikasi tingkat literasi keuangan dasar dan tingkat literasi keuangan lanjut.¹⁷

Otoritas Jasa Keuangan menyimpulkan bahwa Literasi Keuangan adalah pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*), yang mempengaruhi sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Berdasarkan OJK (2013), bahwa tingkat literasi keuangan dibagi menjadi empat bagian, yakni:

a. *Well literate*

memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

¹⁶ Ayu Krishna, Maya Sari dan Rofi Rofaida. 2010. *Analisis tingkat literasi keuangan dikalangan mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi (survey pada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia)*. Jurnal. hlm. 1

¹⁷ Yulia Indrawati. *Determinan Dan Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Perkotaan Dikabupaten Jember*. Jurnal. hlm 4

b. *Sufficient literate*

Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

c. *Less literate*

Hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

d. *Not literate*

Tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Pada rancangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan literasi keuangan memiliki tujuan diantaranya yaitu :¹⁸

- a. Meningkatnya kemampuan dalam pengambilan keputusan keuangan; dan
- b. Mengubah sikap dan perilaku dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik; Sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Syariah adalah kata bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti jalan jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, definisi syariah adalah:¹⁹

¹⁸ OJK.2016. Consultation Paper RPOJK(Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk Konsumen dan/atau Masyarakat).Jakarta:Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Hlm.4

Peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung di antaranya dengan Allah dan di antaranya dengan manusia.

Jadi kesimpulannya, syariah itu berisi peraturan dan hukum-hukum, yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang Muslim. Selain itu juga yang berentangan dengan prinsip syariah dihindari atau ditinggalkan.

Dalam urusan muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Quran dan hadis yang melarangnya, baik secara eksplisit dan implisit. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut.

¹⁹ Karim, Adiwarmagn A. 2010. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm. 7

Tabel 1.3
 Faktor-faktor penyebab terlarangya transaksi

Haram		
Haram Zatnya	Haram Selain Zatnya	Tidak Sah Akadnya
1. Babi	1. Tadlis	1. Tidak terpenuhinya rukun dan syarat
2. Khamr	2. Gharar	2. Terjadi ta'alulq
3. Bangkai	3. Ikhtikar	3. Terjadi "2 in 1"
4. Darah	4. Bai'najasy	
	5. Riba	
	6. Maisir	
	7. Risywah	

Sedangkan nilai-nilai islam akan menjadi payung strategis hingga taktis seluruh aktifitas organisasi sebagai kaidah berfikir, aqidah dan syariah difungsikan sebagai tolok ukur kegiatan organisasi. Tolok ukur tersebut digunakan untuk membedakan aktivitas yang halal dan haram. Kegiatan halal saja yang dapat dilakukan oleh seorang muslim sementara yang haram ditinggalkan guna menggapai keridhaan Allah SWT. Atas nilai-nilai utama itu pula tolok ukur strategis bagi aktivitas perusahaan adalah syariah islam itu sendiri. Oleh karena itu, syariah aturan yang diturunkan Allah untuk manusia melalui lisan para Rasul-Nya, sehingga syariah tersebut harus menjadi pedoman dalam setiap aktifitas. Terdapat beberapa ayat al-qur'an menjelaskan tentang hal tersebut.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“ Kemudian kami jadikan bagi kamu syari’ah, maka ikutilah syariahitu, jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS.al-Jatsiyah:18)

Dengan demikian, orang yang mendambakan keselamatan hidup yang hakiki, akan senantiasa terikat dengan aturan syariah tersebut. Oleh karena syariah mengikat setiap para pelaku keuangan syariah, maka aktivitas perusahaan yang dilakukan tidak boleh lepas dari koridor syariah.

Literasi halal didefinisikan oleh Salehudin (2010) sebagai kemampuan untuk membedakan halal dan haram barang dan jasa berdasarkan pada Syariah (Hukum Islam). *Literacy* Halal ini penting karena sebelum konsumen siap untuk menggunakan produk atau jasa, mereka akan melalui proses pengetahuan, persuasi, keputusan dan konfirmasi (Rogers, 2003). Dengan demikian didefinisikan literasi halal sebagai kemampuan seseorang dengan menggabungkan seperangkat pengetahuan, kesadaran, dan untuk membedakan antara halal dan haram barang dan jasa berdasarkan Undang-Undang Syariah.

Jadi kesimpulanya literasi keuangan syariah yaitu pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan uang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam rangka mencapai kesejahteraan

4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian BPRS

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah dalam tatanan ekonomi Islam. BPRS memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan Bank Perkreditan Rakyat konvensional (BPR). BPR dan BPRS adalah bank yang tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro. Selain itu, BPR maupun BPRS tidak dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran dalam kegiatan usahanya.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, *“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”*.

b. Perbedaan BPRS dan BPR

BPR dan BPRS memiliki perbedaan yang mendasar pada sistem operasionalnya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS menggunakan cara-cara yang harus (wajib) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut ini tabel kegiatan usaha BPRS ditinjau dari dua peraturan perundang-undangan :²⁰

²⁰ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 71-74

Tabel 1.4
Kegiatan Usaha BPR dan BPRS

Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan	Kegiatan Usaha Bank Syariah Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli Tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah
<p>a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (tidak boleh menghimpun dana dalam bentuk giro)</p> <p>b. Memberikan kredit</p> <p>c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia</p> <p>d. Menempatkan menempatan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka,</p>	<p>a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah 2. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah 3. Bentuk lain berdasarkan prinsip mudharabah atau wadiah <p>b. Melakukan penyaluran dana melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istishna, ijarah, salam, jual beli lainnya 2. Transaksi sewa-menyewa dengan prinsip ijarah 3. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, dan/atau musyarakah 4. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip qardh 5. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan prinsip syariah

sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain	
--	--

BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*) yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam dalam skala atau *outlet ritel banking (rural bank)*. Dengan berdirinya BPRS diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, meningkatkan pendapatan perkapita, menambah lapangan kerja, mengurangi urbanisasi dari desa ke kota, dan membina semangat *ukhuwah islamiyah*.²¹

c. Prinsip oprasional perbankan syariah

Bank islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai prinsip oprasional yang terdiri dari:

1) Prinsip simpanan murni

Fasilitas yang diberikan oleh bank islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al wadiah*. Fasilitas *al wadiah* diberikan untuk tujuan investasi seperti halnya tabungan dan deposito.

2) Bagi hasil

Sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.

3) Perinsip jual beli dan margin keuntungan

²¹ Perwataatmadja, Karnaen dan Antonio, M. Syafi'I .1992.*Apa dan Bagaimana Bank Islam* Yogyakarta: Dana Bakhti Prima Yasa. Hlm. 96.

Sistem ini yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan.

4) Prinsip sewa

a) *Ijarah*

Teknis dalam perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.

b) *Bai al takjiri*

Merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5) Prinsip *fee* (jasa)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank secara syariah.

d. Produk-produk perbankan Syariah

1) Produk penghimpun dana

a) Giro *wadi'ah*

Dana yang dititipkan di bank dan setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari pemanfaatan dana giro tersebut, akan tetapi bonus dan besaran nominalnya tidak ditetapkan dimuka. Namun produk tersebut tidak berlaku untuk Bank Pembiayaan Syariah

b) Tabungan *mudharabah*

Dana yang disimpan oleh nasabah akan dikelola oleh bank, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama.

c) Deposito investasi *mudharabah*

Dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

d) Tabungan haji *mudharabah*

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah. Tabungan ini merupakan simpanaan dengan memperolehh imbal hasil (*mudharabah*)

e) Tabungan kurban

Simpanan pihak ketiga yang dihimpun untuk kurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah kurban, atau atas kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Simpanan ini juga akan memperoleh imbal bagi hasil (*mudharabah*).

2) Produk penyaluran dana

a) *Mudharabah*

Bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja, hingga 100 persen, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan managemenya. Bagi hasil keuntungan melalui perjanjian yang sesuai dengan proporsinya.

b) *Salam*

Pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak-pihak lain atau pembeli. Bank memberikan dana pembiayaan diawal untuk membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan tentang harga jual kepada pembeli. Barang yang akan dibeli berada dalam tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang telah ditentukan.

c) *Istishna'*

Pembiayaan kepada nasabah yang terlebih dahulu memesan barnag kepada bank atau produsen lain dengan kriteria tertentu. Kemudian bank dan nasabah membuat perjanjian yang mengikat tentang harga jual dan pembayaran.

d) *Ijarah wa iqtina'*

Merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana sipenyewa mempunyai hak memiliki barang pada akhir pada masa sewa (*financial lease*).

e) *Murabahah*

Pembiayaan pembelian barang yang dapat diaplikasikan untuk tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Bank akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikan.

f) *Al-qardhul hasan*

Pinjaman lunak bagi pengusaha yang kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungna kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja.

g) *Musyarakah*

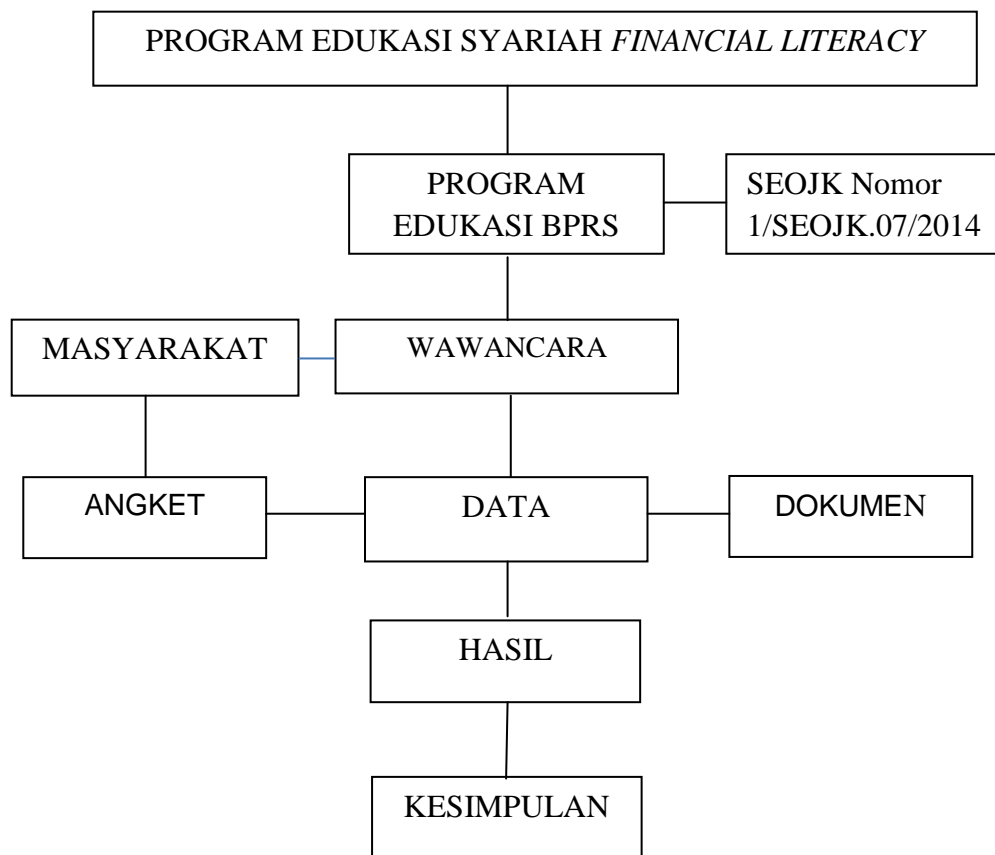
Pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan, dimana pihak-pihak bank akan dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian.

h) Produk pemberian jasa lainnya

Menerima zakat, infak dan shodaqoh (untuk disalurkan).

H. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Progam Edukasi Literasi Keuangan Syariah oleh BPRS kepada Masyarakat dan pemahaman masyarakat tentang lembaga perbankan syariah sebelum mendapatkan edukasi dan pemahaman masyarakat setelah edukasi, objek penelitian ini adalah BPRS Margirizki Bahagia Bantul, Yogyakarta dan masyarakat yang telah mendapatkan edukasi Financial Literacy oleh BPRS Margirizki Bahagia.



Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran Penelitian

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka terdahulu, kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku serta sistematika pembahasan.

2. BAB II: METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya; jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.

3. BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi: a. hasil penelitian. Klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya.
b. pembahasan, sub bahasan a. dan b. digabung menjadi satu kesatuan.

4. BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Sasaran diarahkan pada dua hal, yaitu;

- a. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian;
- b. Saran untuk menentukan kebijakan sibidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.